

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP JUAL
BELI MOJISO DI INSTAGRAM @mojiso.indonesia**

SKRIPSI

Oleh

Imroatul Azizah

NIM. C92217082



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imroatul Azizah

Nim : C92217082

Fakultas/ Jurusan/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum
Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan UU Nomor 33 Tahun
2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Jual
Beli Mojiso di Instagram @mojiso.indonesia

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Sidoarjo, 17 Mei 2021

Saya yang menyatakan,



Imroatul Azizah

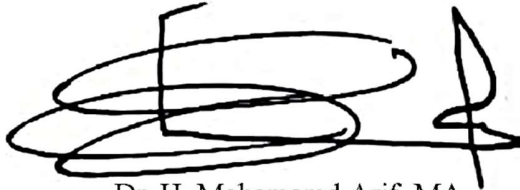
NIM. C92217082

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Jual Beli Mojiso di Instagram @mojiso.indonesia” yang ditulis oleh Imroatul Azizah NIM. C92217082 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 14 Juni 2021

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a final vertical stroke on the right side.

Dr. H. Mohamad Arif, MA
NIP 197001182002121001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Imroatul Azizah NIM C92217082 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Rabu, 7 Juli 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk penyelesaian program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



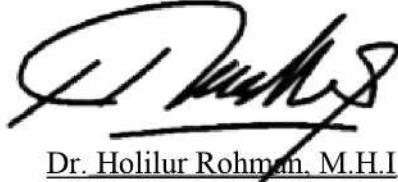
Dr. H. Mohammad Arif, MA
NIP. 197001182002121001

Penguji II



Dr. Hj. Nurhayati, M.Ag
NIP. 196806271992032001

Penguji III



Dr. Holilur Rohman, M.H.I
NIP. 198710022015031005

Penguji IV



Marli Candra, LLB (Hons), MCL
NIP. 198506242019031005

Surabaya, 7 Juli 2021

Mengesahkan
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Imroatul Azizah
NIM : C92217082
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : firsazizah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO 33 TAHUN 2014 TENTANG

JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP JUAL BELI MOJISO DI

INSTAGRAM @MOJISO.INDONESIA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Juni 2021

Penulis


Imroatul Azizah

1. Penelitian yang ditulis oleh Khusnul Rika Andriyani, Hukum Ekonomi 2019 dengan judul “Tinjauan Fatwa DSN MUI No 4 Tahun 2003 Terhadap Penggunaan Label Halal di Bakmi Janda Jemursari Wonocolo Surabaya”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang penggunaan label halal arab dengan lingkaran yang ditampilkan pada produk Bakmi Janda tidak disertai dengan sertifikasi halal MUI. Dan juga pada logo Bakmi Janda melanggar Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 karena menggunakan unsur yang vulgar. Karena di Fatwa DSN MUI No 4 Tahun 2003 terdapat larangan mengkonsumsi makanan atau minuman yang menggunakan nama-nama seperti yang diharamkan dan mengarah kebatilan.¹⁹ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yakni dalam Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003. Dan perbedaannya terletak pada subjek penelitian dan pasal yang dilanggar.
2. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Siti Nur Faiza, Hukum Ekonomi Syariah 2019, dengan judul “Analisis hukum Islam dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Terhadap Penolakan Sertifikasi Label Halal MUI Surabaya Pada Produk Mie Setan”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang penolakan pengajuan sertifikasi label halal oleh MUI Surabaya. Ditolaknya saat mengajukan label halal dikarenakan nama “setan” pada Kober Mie Setan Surabaya dilarang, seperti halnya surga, neraka, dan alam ghaib lainnya. Hal tersebut diatur dalam keputusan Majelis Ulama Indonesia tentang ketentuan penulisan nama produk dan bentuk produk, dengan standar LP POM MUI JATIM nomor: SK46/Dir/LPPOM MUI/ XII/ 14. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Kober Mie Setan Surabaya harus mengganti nama lain untuk mendapatkan label halal dari MUI.²⁰

¹⁹ Khusnul Rika Andriyani, “Tinjauan Fatwa DSN MUI No 4 Tahun 2003 Terhadap Penggunaan Label Halal di Bakmi Janda Jemursari Wonocolo Surabaya” (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

²⁰ Siti Nur Faiza, “Analisis hukum Islam dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Terhadap Penolakan Sertifikasi Label Halal MUI Surabaya Pada Produk Mie Setan” (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Bab Pertama, merupakan Pendahuluan. Terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berjudul Jual Beli, Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal, dan Jaminan Produk Halal dalam UU No. 33 Tahun 2014. Membahas tentang teori jual beli dalam hukum Islam meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, etika jual beli, syarat dan rukun jual beli, hukum dan sifat jual beli, manfaat, hikmah jual beli dan bentuk-bentuk jual beli yang dilarang. Dalam bab ini juga memuat Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal. Kemudian teori terakhir mengenai UU No. 33 Tahun 2014 berisi tentang Jaminan Produk Halal yang berisikan aturan produk halal.

Bab Ketiga berjudul Praktik Jual Beli Mojiso di Instagram @mojiso.indonesia. Berisi tentang profil akun Instagram @mojiso.indonesia, Menu di @mojiso.indonesia, label mojiso, komposisi, harga dan ketentuan *reseller*, serta praktik jual beli mojiso di Instagram.

Bab Keempat berjudul Analisis Hukum Islam dan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Jual Beli Mojiso di Instagram @mojiso.indonesia. Pada bab ini terdapat analisis dari data-data tentang Mojiso dengan Hukum Islam serta UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Bab Kelima yang merupakan penutup. Berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta saran yang bermanfaat.

- a. Demi menjamin pengadaan produk halal, dipastikan bahan produk telah dinyatakan halal, atau berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba maupun bahan yang dihasilkan melalui proses biologi, kimiawi atau proses rekayasa genetik. Selanjutnya ditentukan proses produk halal (PPH) yang merupakan proses penjaminan produk halal, dari mulai penyediaan bahan sampai proses pendistribusian.
- b. Ketentuan ini mengatur hak dan kewajiban pengusaha dengan memberikan pengecualian pada yang memproduksi dari bahan yang diharamkan dengan mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan produknya atau bagian yang mudah dilihat dan dibaca, dan tidak terpisahkan dari produknya.
- c. Untuk memberikan pelayanan publik, pemerintah konsisten dalam menjalankan JPH (Jaminan Produk Halal) yang dalam pengaplikasiannya dijalankan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Dalam menjalankan kedaulatannya, BPJPH bekerja sama dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan LPH (Lembaga Pemeriksa Halal).
- d. Aturan untuk memperoleh sertifikat halal dimulai dengan mengajukan permohonan sertifikat halal oleh pengusaha kepada BPJPH. Kemudian BPJPH melakukan pemeriksaan dokumen dan diuji kehalalannya oleh LPH. LPH yang bersangkutan harus mendapatkan akreditasi dari BPJPH yang bekerjasama dengan MUI. MUI yang menetapkan dan menandatangani kehalalan produk melalui sidang fatwa halal dalam bentuk keputusan Penetapan Produk Halal. Kemudian BPJPH menerbitkan sertifikat halal sebagai keputusan Penetapan Produk Halal dari MUI.
- e. Dalam mengajukan permohonan Sertifikat Halal, biaya dibebankan kepada pengusaha yang mengajukan. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan JPH, dalam undang-undang ini pemerintah berperan dalam mengoptimalkan melalui APBN dan APBD, perusahaan, lembaga sosial, keagamaan,

yakni 20 pcs mojiso. Lalu admin menotalkan biaya yang harus Febi bayarkan. Lalu setelah ditotalkan biaya untuk pembelian mojiso, Febi mentransfer nominal yang ditotalkan admin ke rekening mandiri milik Sovi selaku pemilik mojiso. Lalu selang beberapa hari mojiso yang dipesannya datang dengan menggunakan ekspedisi Kargo. Dengan packing kardus untuk semua mojiso dan tiap botolnya dilapisi bubble wrap.

Sebagai *reseller*, Febi selalu mendapatkan pertanyaan oleh calon konsumen yang akan membeli mojiso mengenai kehalalan produk tersebut mengingat sebutan mojiso sendiri dikenal dengan soju halal. Yang mana calon konsumen selalu memastikan apakah mojiso ini benar-benar halal atau tidak. Dan Febi pun selalu menjelaskan bahwa mojiso terbuat dari bahan non alkohol sebagaimana komposisi yang tertera di kemasan mojiso, hanya saja tidak ada label halal dari MUI. Sebagaimana besar calon pelanggan Febi adalah pembeli baru. Untuk pengirimannya kepada pelanggan, Febi menggunakan jasa pengiriman Grab Express, Go Send, JNE, J&T, Si Cepat. Dan untuk pemasarannya dengan menggunakan Instagram, Facebook, dan Shopee.

Febi megatakan bahwa dia merasa puas sebagai *reseller* sekaligus konsumen mojiso. Karena mojiso sendiri merupakan minuman yang sedang booming-boomingnya dan memudahkan dia sebagai *reseller* untuk menjual kembali mojiso yang dibelinya. Dan sebagai konsumen, Febi mengaku bahwa tidak ada rasa alkohol di dalam mojiso, seperti minuman rasa buah ditambah daun mint. Berbeda dengan rasa soju yang pernah dikonsumsinya.

2. Menurut Nona selaku konsumen yang berdomisili di Surabaya, memaparkan bahwa ia pernah membeli mojiso melalui akun Instagram @mojiso.indonesia. Awal mula ia membeli mojiso karena ia adalah non muslim yang pernah mengkonsumsi soju, ia penasaran ada minuman mirip soju yang klaimnya halal tanpa alkohol, karena sepengetahuannya soju adalah alkohol yang dilarang dikonsumsi oleh umat Islam. Nona memesan mojiso dengan mengunjungi akun Instagram @mojiso.indonesia kemudian mengirim pesan via DM Instagram dan dibalas oleh admin dengan mengirimkan link Shopee mojishop.official untuk memudahkan proses bertransaksi. Setelah memilih

@mojiso.indonesia atau Shopee mojishop.official itu adalah bisnis minuman baru yakni minuman halal dengan rasa buah yang dikemas mirip dengan botol soju minuman haram, yang dikenal dengan soju halal atau soju non alkohol.

Dalam praktik jual belinya yakni pihak pembeli yang biasanya mengirim pesan via DM Instagram akan diarahkan untuk melakukan transaksi via Shopee agar pembayaran lebih mudah dan mendapatkan gratis ongkir. Untuk pembelian dalam jumlah banyak atau untuk dijual kembali, pemilik mojiso memfasilitasi dengan adanya sistem *reseller* yang akan mendapatkan harga lebih murah dengan total ongkos kirim yang lebih murah pula. Untuk barang yang pecah selama proses pengiriman, pihak mojiso rela mengganti kerugian dengan adanya bukti video saat membuka kemasan mojiso.

Di akun Instagram @mojiso.indonesia asal Bandung ini juga sudah jelas mengenai produk yang dijual dan cara pemesanannya. Pertama, akun tersebut menjual produk halal sebagaimana komposisi yang telah dicantumkan di produk dan beberapa postingan Instagramnya, namun memang belum ada sertifikasi halal dari MUI. Kedua, mengenai harga sudah diatur perbotol dengan harga 45.000. Baik distributor maupun pusat harus menjual dengan harga yang sama. Ketiga, untuk pembayaran pemesanan dalam jumlah besar akan diarahkan ke rekening atas nama Sovi selaku pemilik mojiso, dan untuk pembayaran dalam pemesanan kecil akan diarahkan ke Shopee dengan berbagai macam pilihan metode pembayaran. Keempat, untuk proses pengiriman mojiso dalam jumlah satuan akan dikirimkan melalui J&T Express, ID Express, Anteraja dan JNE Yes dan dalam jumlah besar akan dikirimkan melalui ekspedisi Kargo. Apabila produk mojiso pecah selama proses pengiriman akan diganti oleh pihak mojiso selama adanya video pembukaan kemasan.

diupdate harga spesial saat adanya promosi. Setelah mengetahui varian rasa dan mojiso yang dijual, pembeli bisa langsung mengirimkan pesan melalui pesan aplikasi Instagram atau DM. Bisa juga langsung menghubungi nomor WhatsApp yang tertera dan mendapatkan balasan pesan berupa link yang mengarah ke aplikasi Shopee bagi pembelian dalam jumlah kecil.

Selanjutnya, pembeli memilih varian mojiso yang ada di Shopee dan memasukkan varian mojiso yang dipilih dalam keranjang Shopee lalu klik Checkout. Kemudian memasukkan alamat pengiriman, kemudian memilih Opsi Pengiriman. Di opsi pengiriman tersebut terdapat beberapa pilihan jasa pengiriman, antara lain J&T Express, ID Express, Anteraja dan JNE Yes. Lalu memilih Metode Pembayaran. Bisa dengan ShopeePay, SPayLater, Transfer Bank, Kartu Kredit/Debit Online, COD, BCA OneKlik, Alfamart/Alfamidi, dan Indomaret. Setelah itu klik konfirmasi dan Buat Pesanan. Dan pesanan akan diproses oleh pihak mojiso.

Untuk pembelian dalam jumlah banyak bisa mengirim pesan melalui WhatsApp pusat. Setelah itu pemilik akun akan mengirimkan form pemesanan yang berisi nama pemesan, varian yang dipilih beserta jumlahnya, alamat pengiriman. Setelah itu penjual akan memberikan rincian harga yang perlu ditransfer oleh pembeli. Setelah mengetahui total harga, pembeli diharuskan mentransfer sejumlah yang sesuai total harga tersebut ke rekening pemilik mojiso yakni Sovi. Kemudian pembeli melakukan konfirmasi dengan mengirimkan bukti transfer kepada penjual dan penjual akan memproses pengiriman tersebut lalu dikirimkan melalui ekspedisi Kargo karena pengiriman dalam jumlah besar.

Berdasarkan alur mekanisme jual beli mojiso di atas, penulis menjabarkan tentang beberapa hal yang dialami oleh konsumen dari transaksi jual beli mojiso di akun Instagram @mojiso.indonesia. Beberapa konsumen meragukan kehalalan mojiso didasari karena bentuknya yang mirip dengan soju. Namun pada faktanya, di komposisi mojiso tidak terdapat kandungan alkohol. Dan untuk pemberian nama yang tertulis pada label di kemasan mojiso yang dulunya “hallal soju” menjadi “hallal mojiso”, namun juga tidak disertai dengan adanya sertifikat halal. Hal ini tidak sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2014, bahwa setiap produk yang beredar

di Indonesia harus disertai dengan sertifikat halal. Namun hal tersebut bertentangan dengan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003, bahwa terdapat larangan mengkonsumsi makanan yang menggunakan nama seperti yang diharamkan.

Sebenarnya bisnis jual beli mojiso ini merupakan bisnis yang sangat menguntungkan karena dengan bentuk mojiso yang menyerupai soju memang menjadi daya tarik mojiso. Namun bentuk yang menyerupai soju dan dengan adanya kata halal dalam kemasan mojiso tidak disertai halalnya sertifikasi MUI membuat masyarakat meragukan kehalalan mojiso sendiri. Bahwa makanan dan minuman yang halal dimakan juga halal untuk diperjualbelikan.

B. Analisis Hukum Islam dan UU Nomor 33 Tahun 2014 terhadap Jual Beli Mojiso di Instagram @mojiso.indonesia

1. Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Mojiso di Instagram @mojiso.indonesia

Pada uraian bab-bab sebelumnya yang telah penulis paparkan di atas, bahwa objek yang diperjualbelikan adalah mojiso di Instagram @mojiso.indonesia. Selanjutnya hasil analisa penulis adalah sebagai berikut:

1. Jual Beli

Jual beli merupakan aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga sebagai sarana beribadah kepada Allah swt. Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, bahwa praktik jual beli yang terjadi pada akun Instagram @mojiso.indonesia termasuk jual beli yang sah karena telah memenuhi semua rukun dan syarat.

Rukun jual beli antara lain: penjual dan pembeli, sighthat, objek dan mata uang. Adanya sighthat atau ijab dan kabul yang dilakukan oleh penjual dan pembeli mojiso dengan mengisi link pemesanan pada DM Instagram dengan mengisi form yang disediakan. Atau jika melakukan pembelian melalui e-commerce, yaitu dengan memilih varian mojiso yang akan dibeli dan melakukan pembayaran. Selanjutnya adanya objek yang diperjualkan sudah jelas yaitu mojiso yang akan dikirimkan via ekspedisi setelah dilakukannya pembayaran

- 1) Alat pembayaran harus jelas jumlah dan metode pembayarannya oleh pihak yang melakukan transaksi.
- 2) Pembayaran harus dilakukan seutuhnya sesuai kesepakatan akad.
- 3) Pembayaran tidak boleh dilakukan dalam bentuk pembebasan hutang.

Dalam mekanisme jual beli mojiso di akun Instagram @mojiso.indonesia sudah sesuai dengan syarat yang ada dengan jumlah dan metode pembayaran yang telah disepakati di awal ketika akad dan juga tidak dalam bentuk pembebasan hutang.

Sedangkan dalam etika jual beli yang diajarkan oleh Rasulullah saw. adalah dengan menerapkan kejujuran. Jujur dalam makna yang lebih luas merupakan tidak menipu, tidak mengadakan fakta palsu, tidak berbohong, dan tidak ingkar janji. Dalam hal ini mojiso menerapkan kejujuran dalam menjalankan bisnis yang ditekuninya, dengan melampirkan komposisi mojiso dalam botol kemasan. Namun ada tulisan hangeul dalam kemasan mojiso yang bertuliskan *할랄 모지소* (baca: hallal mojiso). Hal tersebut tidak disertai dengan adanya sertifikasi halal yang dikeluarkan MUI, hanya berdasarkan klaim sepihak berdasarkan bahan yang dipergunakan untuk membuat mojiso.

Dari penjelasan di atas dari sudut pandang teori jual beli sudah sah karena telah memenuhi semua syarat dan rukun. Sedangkan menurut teori etika jual beli, jual beli tersebut mengandung unsur ketidakjujuran mengenai penulisan kata halal dalam huruf Korea. Meskipun mojiso terbuat dari bahan yang halal, namun penulisan halal dengan klaim sepihak tanpa adanya sertifikasi halal dari MUI itu tidak sesuai dengan sifat jujur yang diharuskan dalam melakukan transaksi jual beli.

2. Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal

Dalam praktiknya, produk mojiso yang dijual di Instagram @mojiso.indonesia menggunakan kemasan botol berwarna hijau yang mana menyerupai produk soju yang berasal dari Korea, yang mengandung bahan alkohol yang cukup tinggi sehingga membuat soju menjadi minuman yang memabukkan.

Majelis Ulama Indonesia. Pada poin a, produk yang mengandung nama minuman keras seperti bir 0% alkohol masuk dalam kategori Nama Produk yang Tidak Dapat Disertifikasi. Dalam hal ini mojiso juga terkenal dengan sebutan “soju halal” dan pada kemasan mojiso bertuliskan 할랄 모지소 (baca: hallal mojiso).

Berdasarkan pada Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal bagian keempat dan diperjelas dengan SK46/Dir/LPPOM MUI/XII/14 tentang Ketentuan Penulisan Nama Produk Dan Bentuk Produk. Penulis menganalisis bahwa produk mojiso tidak akan bisa mendapatkan sertifikasi halal karena adanya larangan dalam Fatwa bagian keempat nomor empat yang menyatakan larangan mengkonsumsi produk yang menggunakan nama-nama seperti yang diharamkan, karena mojiso pada awalnya menggunakan nama “soju halal”. Hal tersebut juga diperkuat dengan Lampiran SK46/Dir/LPPOM MUI/XII/14, Nomor 3 a, dikarenakan larangan produk untuk disertifikasi karena mengandung nama minuman keras.

Untuk mendapatkan sertifikat halal, mojiso yang juga dikenal dengan soju halal bisa memulai dengan mengganti kemasan yang menyerupai soju dengan kemasan yang berbeda. Karena nama Mojiso Halal yang dulunya Soju Halal tetap dikenal dengan soju halal karena kemasannya yang mirip dengan soju, namun pada faktanya yang tertulis di komposisi mojiso tidak menunjukkan adanya kandungan alkohol sedikitpun.

2. Analisis UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal terhadap Jual Beli Mojiso di Instagram @mojiso.indonesia

Bahwasannya pada UU Nomor 33 Tahun 2014, Pasal 4 berbunyi bahwa semua produk yang beredar, diperdagangkan dan masuk di wilayah Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Namun peraturan ini tidak sejalan dengan peraturan sebelumnya, yakni Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal bagian keempat yang diperjelas dengan Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI No. 46 Tahun 2014 tentang Ketentuan Penulisan Nama Produk Dan Bentuk Produk.

yang menerbitkan sertifikat halal sudah bekerja sama dengan Indonesia, mereka hanya perlu meregistrasi produk tersebut kepada BPJPH, tidak perlu mengajukan sertifikasi halal lagi.

Selanjutnya, Pasal 48 mengatur tentang sanksi administratif yang dikenakan pada Pasal 47 yakni penarikan barang dari peredaran.

Dari ketiga sanksi yang ada bagi pelanggaran UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tersebut tidak ada sanksi bagi yang melanggar Pasal 4 yakni bahwa “semua produk yang beredar, diperdagangkan dan masuk di wilayah Indonesia harus memiliki sertifikat halal”. Hal tersebut yang menyebabkan banyaknya produk yang tidak memiliki sertifikat halal tetap bisa beredar dengan bebas di Indonesia.

Dari penjelasan di atas, menurut sudut pandang penulis mengenai teori jual beli mojiso di Instagram sudah sah karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Sah dan halal dalam hal ini adalah berdasarkan apa yang tertulis di komposisi pada kemasan mojiso. Karena keterbatasan penelitian, penulis hanya bersumber dari kemasan mojiso, dan tidak melakukan pengecekan langsung terhadap kandungan yang ada di mojiso. Lalu berdasarkan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal bagian keempat menyatakan larangan mengkonsumsi produk yang menggunakan nama-nama seperti yang diharamkan, karena mojiso pada awalnya menggunakan nama “soju halal”. Hal tersebut juga diperkuat dengan Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI No. 46 Tahun 2014, Nomor 3 poin a, untuk kategori produk yang tidak dapat disertifikasi karena mengandung nama minuman keras. Namun sangat disayangkan, pada UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tidak ada sanksi apapun tentang produk yang tidak mendaftarkan sertifikasi halal. Sebagaimana Pasal 4 yang mengatur tentang keharusan untuk memiliki sertifikat halal bagi produk yang beredar di Indonesia.

- Muhammad Najihuddin, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Caption* di Akun Instagram @Zarhendrik”. Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Musafa’ah, Suqiyah. *Hadis Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya, 2015. Musafa’ah, Suqiyah. *Tafsir Ayat Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*. Surabaya: IAIN Press, 2015.
- Nur Faiza, Siti. “Analisis hukum Islam dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Terhadap Penolakan Sertifikasi Label Halal MUI Surabaya Pada Produk Mie Setan”. Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Resta Handika, Made dan Gede Sri Darma, “Strategi Pemasaran Bisnis Kuliner Menggunakan Influencer Melalui Media Sosial Instagram”, *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol 15, No 2, April, 2018.
- Rizqi Romdhon, Muhammad. *Jual Beli Online menurut Madzhab Asy-Syafi’i*. Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2015.
- Rika Andriyani, Khusnul. “Tinjauan Fatwa DSN MUI No 4 Tahun 2003 Terhadap Penggunaan Label Halal di Bakmi Janda Jemursari Wonocolo Surabaya”. Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019.
- Romindo. *E-Commerce: Implementasi, Strategi dan Inovasinya*. Yayasan Kita Menulis, 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah* 5, 159.
- Sahrani, Sohari dan Ru’fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta Timur: Kencana, 2019.
- Sumarni, Yenti. *Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi dan Bisnis*, Al Intaj Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 6 No. 2. September, 2020.
- Surya Siregar, Hariman. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 91-92.

